



KEBIJAKAN 'KALENG-KALENG'

SANTUNAN KEMATIAN CORONA

Kucuran anggaran terkait pandemi Covid-19 mulai seret. Bahkan terbaru, Kementerian Sosial (Kemensos) merilis Surat Edaran (SE) yang memutuskan bila tak ada lagi santunan untuk ahli waris pasien Covid-19 yang meninggal dunia. Padahal awal corona melanda Indonesia Maret lalu, secara langsung Presiden Joko Widodo menyerahkan dana sebesar Rp 15 juta bagi ahli waris korban covid. Alasan dihentikannya program tersebut adalah ketiadaan anggaran. Padahal dalam catatan, di tahun 2021 ini ada anggaran setidaknya Rp 148,66 triliun untuk perlindungan sosial. Apakah kebijakan santunan kematian bakal berakhir menjadi 'janji palsu'? Padahal di Perpres vaksinasi terbaru, pemerintah kembali menjanjikan kompensasi warga yang mengalami KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi). Jangan sampai mbleset lagi ya!

Baca Hal 11

PERUBAHAN SE KEMENSOS TERKAIT SANTUNAN KEMATIAN ORBAN CORONA

SURAT EDARAN LAMA:

SE Kemensos RI Nomor 427/3.2/BS.01.02/06/2020, tentang Penanganan Perlindungan Sosial Bagi Korban Meninggal Dunia Akibat Covid-19.

Isi:

1. Santunan meninggal dunia diberikan kepada ahli waris yang anggota keluarganya meninggal disebabkan terinfeksi Covid-19 yang dinyatakan oleh rumah sakit/puskesmas atau dinas kesehatan. Indeks santunan sebesar Rp 15 juta per jiwa.
2. Untuk mengajukan santunan itu, keluarga atau ahli waris korban harus memasukkan sejumlah persyaratan ke Dinas Sosial setempat.

SURAT EDARAN BARU:

SE Nomor 150/3.2/BS.01.02/02/2021 yang mengatur soal santunan untuk ahli waris pasien COVID-19 yang meninggal dunia.

Isi:

1. Menyatakan pada tahun 2021 tidak tersedia alokasi anggaran santunan korban meninggal akibat corona. Sehingga terkait rekomendasi dan usulan yang disampaikan Dinas Sosial Provinsi.
2. Kemosos minta Dinsos provinsi menyampaikan itu ke Dinsos Kabupaten/Kota. Dan selanjutnya tidak memberikan rekomendasi dan usulan lagi kepada Kemensos RI.



Foto: istimedia



Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait pemangkasan cuti bersama tahun 2021, Senin (22/2/2021).

Jakarta - Pemerintah telah menyepakati dan menetapkan perubahan cuti bersama tahun 2021 terkait pandemi Covid-19. Bila sebelumnya ada 7 hari cuti bersama, Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri memutuskan memangkas 5 hari. Jadi total hanya ada 2 hari cuti bersama, yaitu satu hari menjelang Hari Raya Idul Fitri dan satu hari menjelang Natal.

"Dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) sebelumnya terdapat 7 hari cuti bersama. Setelah dilakukan peninjauan kembali SKB, maka cuti bersama dikurangi dari semula 7 hari menjadi hanya tinggal 2 hari saja," ujar Menko PMK Muhadjir Effendy dalam Rapat Koordinasi di Kantor Kemenko PMK, Senin (22/02).

Data terbaru penyebaran corona, jumlah kasus di Indonesia bertambah 10.180 pada Senin (22/02). Total positif menjadi 1.288.833, sembuh 1.096.994, dan meninggal 34.691 kasus.

Jumlah spesimen yang diperiksa hari ini ada 46.562. Sementara jumlah suspek saat ini ada 81.037. Sementara total kasus aktif alias pasien yang masih terinfeksi Covid-19 tercatat sebanyak 157.148 orang, bertambah 60 dibandingkan kemarin.

Soal pemangkasan cuti ini tertuang dalam SKB Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 281

COVID-19 BELUM TERATASI, CUTI BERSAMA 2021 CUMA 2 HARI

Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 tahun 2020 Tentang Hari libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2021.

Soal pemangkasan cuti ini diputuskan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Peninjauan SKB Cuti Bersama tahun 2021 yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, dan dihadiri oleh Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Sekjen Kemenag Nizar Ali, Sekjen Kemnaker, Asops Kapolri, dan Pejabat Eselon 1 K/L terkait. "Jangan sampai terjadi penumpukan pada satu hari dan justru akan berbahaya," ujar Muhadjir.

Lebih lanjut, Menko PMK menjelaskan beberapa alasan pengurangan libur, yakni kurva peningkatan Covid-19 belum melandai meski berbagai upaya sudah dilakukan. Setelah libur panjang, ada kecenderungan kasus Covid-19 mengalami peningkatan. Mobilitas masyarakat cenderung naik. Sementara itu, program vaksinasi sedang berjalan.

"Oleh karena itu, pemerintah perlu meninjau kembali cuti bersama yang berpotensi mendorong terjadinya arus pergerakan orang sehingga penularan meningkat," tuturnya.

Pemerintah juga tetap mengimbau masyarakat menjalankan 5M protokol kesehatan dan berusaha bersama-sama memutuskan rantai

penularan Covid-19. "Sekali lagi ditegaskan bahwa Tahun 2021 Cuti Bersama dipotong 5 hari dari 7 hari yang ada," pungkaskan Muhadjir.

40% Gen Z Tak Mau Divaksin

Terkait penanggulangan wabah corona, lewat hasil survei Indikator Politik, generasi Z atau anak-anak muda kelahiran 1996-2015 terpantau banyak yang emoh divaksinasi Covid-19. Kenapa ya?

Generasi yang 'dibesarkan langsung' oleh teknologi ini ternyata punya persentase yang cukup besar dalam hal ketidakmauan untuk divaksinasi. Persentase gen Z yang tidak bersedia divaksinasi memang tidak sampai melampaui persentase gen Z yang bersedia. Namun angka gen Z yang tidak mau divaksinasi cenderung lebih besar ketimbang generasi di atasnya, termasuk generasi milenial yang menjadi kakaknya.

Survei Indikator Politik dilakukan pada 1-3 Februari. Sebanyak 43,9 persen kelompok usia 22-25 tahun tidak bersedia divaksin. Sedangkan 45,1 persen bersedia. Kelompok usia yang paling banyak bersedia divaksin adalah lanjut usia atau di atas 55 tahun, dengan 61 persen.

Selain kelompok usia, komunikasi publik secara spesifik juga akan ditujukan kepada kelompok etnis tertentu. Dari hasil survei Indikator, etnis Jawa mayoritas bersedia menerima vaksin ketimbang etnis lainnya.

Masih dari survei Indikator, nonmuslim lebih bersedia divaksin ketimbang muslim. Survei menunjukkan, 52,6 persen muslim bersedia divaksin, sedangkan 71,6 persen nonmuslim bersedia divaksin. (ist)



CUTI BERSAMA 2021 YANG DIPANGKAS (TOTAL 5 HARI)

- **12 Maret:** Cuti Bersama dalam rangka Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW,
- **17, 18, 19 Mei:** Cuti Bersama dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah
- **27 Desember:** Cuti Bersama dalam rangka Hari Raya Natal 2021.

TREN LONJAKAN KASUS CORONA PASCA LIBUR PANJANG

- **Libur Idul Fitri 22-25 Mei 2020:** Peningkatan kasus positif 69-93 persen pada tanggal 6-28 Juni 2020.
- **Libur HUT RI 15-17 Agustus 2020:** Peningkatan kasus positif 58-188 persen pada tanggal 1-3 September 2020.
- **Libur Akhir Oktober:** Peningkatan kasus positif 17-22 persen pada tanggal 8-22 November 2020.

CUTI BERSAMA 2021 YANG TETAP (TOTAL 2 HARI)

- **12 Mei** dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah W,
- **24 Desember** dalam rangka Hari Raya Natal 2021.

● Catatan: Pertimbangan mengapa masih diberikan satu hari menjelang Hari Raya Idul Fitri dan satu hari menjelang Natal, agar memudahkan Polri dalam mengelola pergerakan masyarakat.

DORONGAN RUU PERAMPASAN ASET MASUK PROLEGNAS PRIORITAS MENGUAT

Jakarta- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diminta mendorong RUU Perampasan Aset Tindak Pidana masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas DPR RI 2021 atau 2022. Sebab dengan aturan tersebut bisa memberikan efek jera dan maksimalisasi pengembalian kerugian negara.

Fickar menjelaskan, RUU Perampasan Aset kepanjangan tangan dari pembuktian terbalik. Hal itu, imbuhnya, berimplikasi dengan pertanggungjawaban harta pejabat publik.

Sebelumnya, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae mengatakan regulasi tersebut "sejalan dengan kerangka regulasi RPJMN 2021 yang dibahas dan disepakati di Bappenas."

Dian mengatakan peraturan ini dapat menambal bolong regulasi yang eksis saat ini, yaitu belum optimalnya penyelamatan aset khususnya hasil tindak pidana yang sukar dibuktikan dan dalam penguasaan tersangka atau terdakwa yang meninggal dunia. RUU Perampasan Aset berpotensi mengembalikan kerugian negara dari hasil tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana ekonomi lainnya. Ia juga diharapkan dapat memberi efek jera bagi pelaku korupsi.

Apalagi menurut Peneliti dari Transparency Internasional Indonesia (TII) Alvin Nicola melihat konsep pemberantasan korupsi di Indonesia cenderung mengikuti tersangka dan tidak menelisik aliran uang. "Pantauan TII, dari 2014-2018, ada kurang lebih 534 perkara tipikor namun penerapan delik pencucian uang dari UU TPPU di dalam dakwaan penuntut umum hanya 23. Sangat mungkin efek jera yang selama ini diharapkan tidak benar-benar hadir," ujarnya.

Sementara KPK menyambut baik usulan RUU Perampasan Aset masuk Prolegnas Prioritas 2021 di DPR. Apabila segera disahkan, komisi antikorupsi memandang regulasi itu akan memberikan banyak manfaat, khususnya dalam pemulihan aset.

"Dengan menjadi UU, maka akan memberikan efek dan manfaat positif bagi dilakukannya asset recovery dari hasil tipikor (tindak pidana korupsi) maupun TPPU (tindak pidana pencucian uang)," kata Pelaksana tugas Juru Bicara bidang Penindakan KPK Ali Fikri.

RUU Perampasan Aset mulai disusun pada 2008. Selesai dibahas antarkementerian dan harmonisasi pada November 2010. Rancangan beleid itu, telah disampaikan kepada Presiden melalui surat Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.PP.02.03-46 tanggal 12 Desember 2011.

Sebelumnya, Anggota Dewan Perwakilan



ASET SIAPA SAJA YANG BISA DIRAMPAS NEGARA?

Rakyat (DPR) Masinton Pasaribu juga mendorong penerapan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-undang (UU). "Kita harus dorong bagaimana RUU Perampasan Aset. Itu menjadi salah satu bagaimana kerugian negara, yang sudah terjadi itu bisa dikejar pengembaliannya," katanya.

Prinsip dasar yang ada pada RUU Perampasan Aset yaitu harta hasil kejahatan tidak boleh memberikan keuntungan bagi pelaku korupsi. Dengan penerapan RUU ini, negara tidak sebatas menghukum para pelaku korupsi, tapi juga mampu mengejar kerugian negara.

Melalui RUU Perampasan Aset, lanjut Masinton, para pelaku kejahatan lainnya yang pada prinsipnya telah merugikan publik dan negara juga dapat diadili.

RUU Perampasan Aset ini bukan hanya untuk pelaku kejahatan korupsi saja, tapi juga untuk pelaku kejahatan lainnya, yang prinsipnya dia merugikan publik dan dia menikmati untungnya dari situ," ucap dia. "Kejahatan lain seperti narkoba, kalau kita lihat sekarang pelaku-pelaku narkoba itu, bandar-bandar besar itu, sangat menikmati keuntungan dari hasil kejahatannya," sambung politikus Partai PDI Perjuangan itu. (ist)

Pasal 2

(1) Aset yang dapat dirampas berdasarkan Undang-Undang ini adalah:

- Aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana termasuk yang telah dihibahkan atau dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi, orang lain, atau Korporasi baik berupa modal, pendapatan, maupun keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut;
- Aset yang diduga kuat digunakan atau telah digunakan untuk melakukan tindak pidana;
- Aset lainnya yang sah sebagai pengganti Aset Tindak Pidana; atau
- Aset yang merupakan barang temuan yang diduga berasal dari tindak pidana.

(2) Aset yang dapat dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- Aset yang bernilai paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); atau
 - Aset yang berasal dari tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan nilai minimum Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a maka penyesuaian nilai minimum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 3

(1) Setiap Orang yang memiliki

Aset yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau yang tidak seimbang dengan sumber penambahannya dan tidak dapat membuktikan asal usul perolehannya secara sah maka Aset tersebut dapat dirampas berdasarkan Undang-Undang ini.

(2) Aset yang tidak seimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Aset tidak wajar yang dihitung melalui total kekayaan dikurangi penghasilan yang diperoleh secara sah.

Pasal 14

(1) Perampasan Aset dilakukan dalam hal:

- tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya; atau
 - terdakwa dijatuhi hukuman dari segala tuntutan hukum.
- (2) Perampasan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan terhadap Aset yang perkara pidananya:
- tidak dapat disidangkan; atau
 - telah dijatuhi bersalah oleh pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan di kemudian hari ternyata diketahui terdapat Aset dari tindak pidana yang belum dinyatakan dirampas.

(3) Perampasan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap kekayaan yang tidak wajar yang akan dirampas.

ATASI MACET AKIBAT PARKIR SEMBARANGAN KLAIM EFEKTIVITAS PARK AND RIDE, SURABAYA MILIKI 5 TITIK

DAYA TAMPUNG 5 PARK AND RIDE DI SURABAYA

MAYJEN SUNGKONO	: 100  , 89  , 5 
GENTENG KALI	: 180  , 18 
ADITYAWARMAN	: 35  , 40 
KERTAJAYA	: 84  , 8 
ARIF RAHMAN HAKIM	: 40  , 38  , DAN 3 



Park and Ride di Jalan Majyend Sungkono Surabaya

Foto: Adhni/LenteraToday

SURABAYA - Layanan Park and Ride Pemerintah Kota Surabaya diharapkan menjadi solusi efektif untuk memindahkan parkir kendaraan on street ke parkir off street. Langkah inipun diklaim efektif memperlancar arus lalu lintas yang seringklai macet akibat mobil parkir sembarangan di bahu jalan.

"Jadi fungsi jalan bisa dikembalikan yaitu sebagai lalu lalang kendaraan, bukan tempat parkir. Sehingga, sangat efektif dan kelancaran lalu lintas meningkat," ujar Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajad, Senin (22/02).

Irvan memaparkan, ada 5 titik yang disediakan oleh pemerintah kepada masyarakat kota pahlawan. Yakni, Park and Ride Mayjen Sungkono, Parkir Adityawarman, Parkir Kertajaya, Parkir Genteng Kali, dan Parkir Arif

Rahman Hakim.

Park and Ride Mayjen Sungkono bisa menampung 100 motor, 89 mobil, 5 truk atau bus. Kemudian, Parkir Genteng Kali 180 motor, 18 mobil. Lalu, Parkir Adityawarman 35 motor, 40 mobil. Parkir Kertajaya 84 motor, 8 mobil. Hingga Parkir Arif Rahman Hakim 40 motor, 38 mobil, dan 3 truk atau bus.

"Keuntungan bagi kota menghindari kemacetan, polusi dan kerugian ekonomi. Khususnya, biaya operasional kendaraan. Serta, mengurangi stress bagi pengguna jalan karena kemacetan," ujarnya. Rencana pengembangan, kata Irvan, tiap tahun ada. Namun, fokus anggaran saat ini masih ke penanganan Covid-19.

"Tidak masalah kalau warga yang tidak punya garasi parkir di Park and Ride. Daripada mereka parkir di jalan dan mengganggu lalu

lintas," tuturnya.

Irvan mengimbau kepada masyarakat, untuk tidak parkir di rambu larangan. Karena, pihaknya rutin melakukan operasi gabungan dengan kepolisian dan TNI berpatroli rutin, melakukan penilangan dan penggembokan.

Terpisah, Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Baktiono Park and Ride yang lain perlu dibangun di tempat-tempat yang mempunyai kepadatan penduduk tinggi. "Fasilitas ini harus disediakan oleh pemerintah agar bisa membawa manfaat bagi warga Kota Surabaya," tandasnya.

Apalagi, masyarakat saat ini banyak juga yang memiliki mobil untuk bekerja atau transportasi online. Sehingga, ini yang bisa dimanfaatkan sebagai parkir. Mereka juga dijamin keamanannya bahkan bagi warga lain yang akan berkunjung ke saudara atau kerabatnya, juga bisa memarkir kendaraannya di tempat tersebut. "Karena tidak akan mengganggu pemakai jalan lain," katanya. (Ard)

'SISCO', INOVASI APLIKASI REAL TIME COVID-19 PEMKAB BLITAR

BLITAR - Inovasi terus digeber untuk memudahkan masyarakat saat pandemi Covid-19 belum diketahui kapan berakhir. Seperti yang dilakukan Pemkab Blitar melalui Dinas Informasi dan Komunikasi (Infokom) dengan meluncurkan aplikasi real time Sistem Informasi dan Grafis Covid-19 (SISCO). Langkah ini dilakukan untuk mempermudah masyarakat mengakses data dan informasi mengenai perkembangan corona.

Disampaikan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Blitar, Eko Susanto jika hari ini bersamaan dengan rapat analisa dan evaluasi PPKM Mikro di Ruang Transit Kantor Bupati Blitar di Kanigoro, juga diluncurkan aplikasi real time SISCO yaitu Sistem Informasi dan Grafis Covid-19. "Aplikasi ini dibuat oleh Kominfo Kabupaten Blitar untuk mempermudah data informasi, mengenai perkembangan Covid-19 di Kabupaten Blitar," ujar Eko, Senin (22/02).

Lebih lanjut Eko menjelaskan jika aplikasi ini berisi data Covid-19 mulai tingkat kecamatan sampai RT, seperti angka positif, sembuh dan meninggal dunia. "Serta dilengkapi dengan grafis, sehingga mudah dibaca dan digunakan untuk memantau pernyebaran Covid-19," jelasnya.



Pemkab Blitar menggelar rapat analisa dan evaluasi PPKM di Kabupaten Blitar

Foto: Ais/LenteraToday

Dengan aplikasi SISCO ini pihak yang membutuhkan data, seperti TNI-Polri, Satgas Covid-19 dan Muspika bisa menggunakan untuk laporan harian. "Kalau selama ini harus menginput data dulu melalui excel, kemudian diolah oleh Kominfo untuk menjadi info data dan grafis baru bisa digunakan. Sekarang Satgas Covid-19 cukup menginput data, langsung muncul info dan grafisnya," terang Eko.

Rapat dipimpin langsung oleh Plh Bupati Blitar, Mujiyanto dengan dihadiri Dinkes, BPBD, Satgas Covid-19 dan OPD terkait kesehatan lainnya. Dengan menerapkan protokol kesehatan ketat, mulai menjaga jarak dan

memakai masker.

Saat ini diungkapkan Eko aplikasi SISCO sudah 3 hari digunakan, proses input data masih terus berjalan. Mulai data tiap kecamatan, sampai desa/ kelurahan hingga RT. "Jadi input data dari tiap RT sedang berjalan, bertahap seluruh data akan masuk dalam aplikasi ini," ungkapnya.

Ke depan aplikasi ini akan dikembangkan dengan menu tambahan mengenai Covid-19, seperti info vaksinasi dan kondisi ruang isolasi. "Dengan satu aplikasi SISCO, seluruh informasi mengenai Covid-19 di Kabupaten Blitar ada dan lengkap," tandas Eko.

Secara terpisah Plh Bupati Blitar, Mujiyanto menyampaikan pemerintah pusat telah memutuskan memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan masyarakat (PPKM) Mikro di tingkat Desa / Kelurahan di Jawa dan Bali termasuk Jawa Timur, mulai pada 23 Februari hingga 8 Maret 2021 mendatang.

"Kebijakan tersebut tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No 4 Tahun 2021 yang ditindaklanjuti oleh Gubernur Jawa Timur, dengan menerbitkan aturan kebijakan di masing-masing daerah," kata Mujiyanto. (ais)

KABUPATEN PASURUAN OPTIMISTIS PARIWISATA TETAP STABIL SAAT PANDEMI



Wabup Pasuruan Gus Mujib berkesempatan untuk melakukan panen raya buah Kurma yang ditanam di areal objek wisata Kebun Kurma yang berlokasi di Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kab. Pasuruan.

Pasuruan- Meski Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala Mikro diperpanjang hingga 8 Maret nanti, tapi sektor pariwisata di Kabupaten Pasuruan diprediksi tidak akan terganggu. Sebab, selama pandemi Covid-19 melanda, tingkat kunjungan wisata di wilayah ini relatif stabil.

Wakil Bupati (Wabup) Pasuruan KH Abdul Mujib Imron menyampaikan, disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan (Prokes) merupakan kunci utama yang wajib diperhatikan. Baik bagi para pengelola tempat wisata maupun masyarakat sebagai pengunjung.

"Selama pandemi dan penerapan PPKM Mikro, saya yakin tidak akan berdampak signifikan terhadap sektor pariwisata di Kabupaten Pasuruan. Karena pengelola objek wisata kan masih bisa menerima tamu wisatawan dengan penerapan prokes ketat. Meski hanya di-perbolehkan menerima

pengunjung 50 persen dari biasanya. Penurunannya juga tidak kelihatan juga", tuturnya.

Gus Mujib-- panggilan akrab Wabup-- berharap, semua pihak mampu menerapkannya dengan baik. Terlebih sektor pariwisata di Kabupaten Pasuruan sangat berpeluang untuk kembali bangkit, sekalipun di masa pandemi.

"Saya berharap, para pengelola wisata untuk tetap disiplin dengan penerapan PPKM skala mikro. Untuk masyarakat, tidak usah takut untuk datang ke tempat wisata di Kabupaten Pasuruan. Yang penting, tetap disiplin menerapkan prokes. Tidak boleh ada kerumunan, jaga jarak dan bermasker", pesannya.

Sebelumnya, Gus Mujib berkesempatan untuk melakukan panen raya buah Kurma yang ditanam di areal objek wisata Kebun Kurma yang berlokasi di Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Minggu (21/02). Didampingi Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan Eka Wara, Camat Sukorejo beserta jajarannya, Wakil Bupati memotong satu tandan buah Kurma muda berwarna kuning keemasan tersebut, langsung dari dahannya.

"Kebun Kurma adalah wisata unggulan di Kabupaten Pasuruan, masuk wisata agro yang pertama di Indonesia dengan beragam

jenis pohon Kurma. Lengkap dengan edukasi tentang pertumbuhan Kurma yang berhasil dibudidayakan di Kecamatan Sukorejo. Yang masuk ke sini juga memenuhi standart PPKM Mikro dan prokes. Kami berharap, semua pengunjung bisa mematumhinya", paparnya dengan penuh semangat.

Sembari memegang setandan buah Kurma hasil panennya, di hadapan para tamu undangan dan pengunjung Kebun Kurma, Gus Mujib juga mengajak kepada seluruh pihak agar turut berpartisipasi aktif dalam mempopulerkan objek wisata ke khalayak luas. Sehingga bisa lebih dikenal dan banyak dikunjungi wisatawan. Tidak hanya wisatawan lokal dari wilayah Pasuruan dan sekitarnya saja, tetapi juga skala nasional.

"Saya mengajak Kadis Pariwisata, Pak Camat, Forkopimka, bersama-sama mari kita viralkan objek wisata Kebun Kurma ke publik. Jadi bukan hanya milik perseorangan saja, tapi juga seluruh warga Kabupaten Pasuruan. Berkewajiban untuk terus berkoordinasi dan membuat jaringan dengan wisatawan agar terus berkunjung ke Kebun Kurma", pungkasnya. (adv)



Pengunjung dicek suhu tubuhnya sebelum masuk areal objek wisata Kebun Kurma yang berlokasi di Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo.

TENTUKAN UU ITE DIREVISI ATAU TIDAK, TIM PENGKAJI DIDEADLINE 3 BULAN

Jakarta- Pemerintah akhirnya membentuk tim khusus untuk mengkaji apakah revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) perlu dilakukan atau tidak. Tim Kajian UU ITE diberi waktu 3 bulan untuk bekerja.

"Namanya diskusi tentu perlu waktu, kita beri waktu 2 bulan lah (red: 3 bulan) kepada tim ini agar terus dibahas," kata Menkopolkam Mahfud MD dalam konferensi pers di kantornya, Senin (22/02).

Pembentukan tim ini merespons pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut UU ITE kerap dinilai menjadi alat saling lapor dan kriminalisasi sehingga merugikan masyarakat. Mahfud mengatakan, tim ini akan membahas mengenai substansi apakah benar ada pasal karet dalam UU ITE. Sebab, kata dia, ada anggota DPR yang setuju dan tidak soal adanya pasal karet di UU tersebut.

"Tim untuk membahas substansi, apa betul ada pasal karet, di DPR sendiri ada yang setuju, ada yang tidak. Ada yang bilang bahaya kalau enggak ada undang-undang itu nanti

semuanya orang saling serang sendiri, saling bunuh saling serang, enggak ada, polisi enggak bisa bertindak dan sebagainya," kata dia.

"Tapi ada yang katakan, wah itu bisa jadi alat untuk membuka perang lainnya. Pemerintah di pemerintahan yang menganut sistem demokrasi akan membuka ruang diskusi itu untuk kemudian tim mengambil sikap resmi," sambungnya.

Mahfud mengatakan, sikap resmi ini yang nantinya akan dilaporkan tim kepada pemerintah. Apakah memang perlu revisi UU ITE atau tidak. "Nanti tim ini akan laporan ke kita apa bentuknya, apa hasilnya. Kalau keputusan harus revisi kita akan sampaikan ke DPR," ujarnya.

Sembari menunggu tim bekerja, kata Mahfud, penegak hukum baik Polri dan Kejaksaan Agung, diharapkan bekerja sebaik mungkin saat menghadapi pelaporan terkait UU ITE. Ia berharap, UU ini tak multitafsir.

"Nah sembari menunggu yang 2 atau 3 bulan itu nanti Polri dan Kejagung supaya

betul-betul tidak multi interpreter, tidak multitafsir, ini benar ini tidak hanya berlaku pada si a tapi berlaku pada b karena semua unsur itu terpenuhi di situ," pungkasnya.

Tim Kajian UU ITE ini dibentuk melalui Keputusan Menkopolkam Nomor 22 Tahun 2021 yang diteken pada Senin (22/2). Tim tersebut diberi waktu kerja 3 bulan hingga 22 Mei 2021 untuk menentukan perlu atau tidaknya revisi UU ITE.

Susunan Tim Kajian UU ITE terdiri dari pengarah dan tim pelaksana. Pengarah terdiri dari Menkopolkam Mahfud MD, Menkumham Yasonna Laoly, Menkominfo Jhonny G Plate, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit.

Sementara tim pelaksana UU ITE dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenko Polhukam, Sugeng Purnomo. Adapun tim pelaksana dibagi menjadi 2 yakni Sub Tim I (Tim Perumus Kriteria Penerapan UU ITE) dan Sub Tim II (Tim Telaah Substansi UU ITE). (ist)

IMPRESSION

A portrait of Retno Marsudi, a woman with short dark hair, wearing glasses, a black blazer, a white lace collar, and a pearl necklace. She is standing in front of a row of colorful flags.

Retno Marsudi

MENLU PEREMPUAN PERTAMA RI,

SUKSES JADI IBU MAUPUN ISTRI

Foto : istimewa

www.lenteratoday.com

Retno Marsudi merupakan Menteri Luar Negeri (Menlu) perempuan pertama Indonesia. Tak hanya mampu membawa negeri ini di kancah internasional, Retno juga merupakan istri dan ibu yang dicintai seluruh keluarganya.

Saat Retno menjadi Menlu, Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dua kali, yakni periode 2019-2020 dan 2020-2022. Semua itu dia lakukan sambil tetap menjalankan perannya sebagai seorang istri dan ibu.

Bernama lengkap Retno Lestari Priansari Marsudi, dia lahir pada 27 November 1962 di Semarang, Jawa Tengah. Retno, yang merupakan lulusan SMA Negeri 3 Semarang (salah satu sekolah unggulan di kota tersebut) tahun 1981, selalu berprestasi di bidang akademik semasa sekolah dulu.

Dia meraih gelar sarjana dari jurusan Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dengan predikat cum laude. Tak lama setelah lulus kuliah, Departemen Luar Negeri (kini Kementerian Luar Negeri) tengah mengadakan seleksi calon diplomat di sepuluh universitas top Indonesia, termasuk UGM. Retno berhasil lolos seleksi sebagai calon diplomat dan diterima bekerja di Departemen Luar Negeri.

Guna memperkaya wawasannya, dia meneruskan studi ke Program Studi Undang-Undang Uni Eropa di Haagse Hogeschool, Den Haag, Belanda pada tahun 2000. Retno kemudian menuntut ilmu di Studi Hak Asasi Manusia di Universitas Oslo, Norwegia, sebagai mahasiswa tamu pada 2006.

Potensi dan prestasinya yang moncer membuat Retno dilirik Presiden Jokowi. Retno pernah bertugas di Kedutaan Besar Indonesia untuk Australia (1990-1994) dan Belanda (1997-2001). Dia pernah juga menjabat sebagai Direktur Kerjasama Intra dan Antar-regional Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri (2001-2003) dan Direktur Eropa Barat Kementerian Luar Negeri (2003-2005).

Sejak 2005 sampai 2008, Retno dipercaya menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Norwegia dan Republik

Islandia. Sementara, pada 2008 sampai 2012, dia ditunjuk sebagai Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri. Pada 2012 sampai 2014, Retno kembali ke Belanda sebagai Duta Besar Republik Indonesia.

Pencapaiannya yang luar biasa membuat Presiden Joko Widodo menunjuknya untuk menjadi Menteri Luar Negeri selama dua periode berturut-turut, yaitu 2014-2019 dan 2019-sekarang. Berkat Retno pula Indonesia sukses menjadi presiden DK PBB pada Mei 2019 dan Agustus 2020. Istri, Ibu, dan Diplomat

Mengabdikan diri kepada negara sebagai seorang diplomat sambil menjalankan perannya sebagai seorang istri dan ibu diakui Retno tidak mudah, namun tetap mungkin dilakukan. Ketika kedua putranya masih kecil, Retno tetap meluangkan waktu untuk memandikan, memberi makan, dan mengantarkan mereka ke sekolah. Semua dilakukannya sambil tetap mengurus pekerjaan diplomasi internasionalnya yang tak kenal waktu.

Saat anak sakit sekalipun, Retno tetap telaten merawat mereka sampai sembuh tanpa mengabaikan pekerjaan di kementerian. Meski lelah, tapi kerja kerasnya untuk keluarga dan negara terbukti berbuah manis.

Laman Kemenlu menyebutkan, putra pertama Retno, Dyota Marsudi (lahir 1989), sekarang sudah menjabat sebagai Direktur Eksekutif di suatu perusahaan modal ventura. Putra keduanya, Bagas Marsudi (lahir 1993), kini berprofesi sebagai seorang dokter.

Saat Indonesia dihantam pandemi Covid-19 seperti negara-negara lain di dunia, Retno memperjuangkan kesetaraan akses vaksin Covid-19 untuk semua negara dalam Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) Luar Negeri yang diselenggarakan secara virtual.



Retno Marsudi

Foto: Antara/Mahyul Purto A

Teranyar, awal Februari lalu Retno bertemu dengan Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki di Amman, Yordania. Dalam pertemuan tersebut, Riyad menyampaikan apresiasi kepada Indonesia yang telah mendukung Palestina selama ini. (ist)



Foto: Instagram/Retno Marsudi

Makanan Dipercaya Ampuh Turunkan Tekanan Darah, Apa Saja?

Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan faktor paling umum yang dapat menyebabkan penyakit jantung. Pengobatan seperti penghambat angiotensin-converting enzyme (ACE) atau enzim pengubah angiotensin biasanya umum digunakan untuk mengurangi tingkat tekanan darah.

Namun, perubahan gaya hidup tentunya memiliki peran dalam menurunkan tingkat tekanan darah dan mengurangi risiko penyakit jantung. Diet sehat merupakan hal paling penting untuk menurunkan tekanan darah dan menjaga tekanan dalam tingkatan optimal. Peneliti menemukan bahwa sejumlah makanan, khususnya dengan kandungan nutrisi tertentu seperti potasium dan magnesium, dapat mengurangi tingkat tekanan darah.

Dikutip dari Healthline, ini makanan yang dipercaya efektif mengontrol tekanan darah tinggi.



SALMON DAN IKAN BERLEMAK LAINNYA

Ikan dengan kandungan lemak merupakan sumber utama omega-3 yang memiliki manfaat bagi kesehatan jantung. Omega-3 dapat mengurangi tingkat tekanan darah dengan mengurangi peradangan dan tingkat senyawa pada pembuluh darah bernama oxylipin.

Peneliti mengungkapkan bahwa mengonsumsi ikan berlemak dengan kandungan omega-3 dapat menurunkan tingkat tekanan darah dan risiko terkena hipertensi.



WORTEL

Wortel merupakan sayuran yang kerap dimasukan ke dalam menu diet. Wortel kaya akan senyawa, seperti klorogenat, asam p-kumarat, dan asam kafeat, yang dapat membantu membuat pembuluh darah merasa lebih rileks, mengurangi peradangan, serta mengurangi tingkat tekanan darah. Namun, bagi orang dengan tekanan darah tinggi, mengonsumsi wortel mentah lebih dianjurkan daripada wortel yang telah dimasak.



SELEDRI

Salah satu sayuran populer ini ternyata memiliki efek positif bagi tekanan darah. Seledri mengandung senyawa bernama phthalides yang dapat membuat pembuluh darah lebih rileks, sehingga tekanan darah pun ikut menurun. Berbeda dengan wortel, seledri direkomendasikan untuk dimakan jika sudah dimasak. Seledri yang sudah dimasak memiliki efek signifikan terhadap penurunan tekanan darah.



TOMAT

Tomat serta produk yang berbahan dasar tomat kaya akan nutrisi, termasuk potasium dan likopen. Likopen memiliki manfaat bagi kesehatan jantung. Mengonsumsi makanan dengan kandungan likopen, seperti tomat, dapat mengurangi risiko penyakit jantung dengan mencegah faktor risiko seperti tekanan darah tinggi.



BROKOLI

Brokoli terkenal akan berbagai manfaat bagi kesehatan, termasuk kesehatan sistem sirkulasi. Brokoli mengandung antioksidan tinggi yang dapat mengurangi tekanan darah dengan meningkatkan fungsi pembuluh darah serta tingkat oksida nitrat dalam tubuh.

Sebuah studi yang melibatkan sebanyak 187.453 orang menemukan bahwa mereka yang mengonsumsi 4 atau lebih porsi brokoli setiap minggunya memiliki risiko lebih rendah terkena tekanan darah tinggi daripada mereka yang mengonsumsi brokoli sebulan sekali atau kurang. Selamat mencoba! (ist)



ZYREX CONFIDANTE, LAPTOP BERPROSESOR QUALCOMM PERTAMA DI INDONESIA



Foto: Istimewa

Qualcomm pertama merilis platform 'Always On, Always Connected' untuk laptop sejak 2018, namun baru kali ini ada yang merilis perangkat berbasis platform tersebut di Indonesia.

Perangkat tersebut adalah Zyrex Confidante, yang menggunakan Snapdragon 850 Mobile Compute Platform, dengan sistem operasi Windows 10 yang didesain untuk chip ARM.

"Ini adalah perangkat komersial pertama di Indonesia yang menggunakan platform

'always on always connected' PC di Indonesia," ujar Shannedy Ong, Country Director Qualcomm Indonesia dalam acara peluncuran yang digelar virtual 16 Februari 2021.

Perangkat ini dijanjikan bakal bisa selalu menyala dan terkoneksi ke internet. Ponselnya Confidante mempunyai slot SIM card yang membuatnya bisa terhubung dengan jaringan 4G LTE, dan tak terpaku pada koneksi internet lewat WiFi.

"Dengan laptop Zyrex Confidante anda

dapat beraktivitas sehari-hari tanpa terganggu, satu laptop yang selalu On dan setia menemani Anda," kata Timothy Siddik, CEO Zyrex dalam acara yang

sama.

Snapdragon 850 Mobile Compute Platform yang dipakai mempunyai delapan core dengan kecepatan sampai 2,96 GHz dan GPU Adreno 630. RAM-nya berkapasitas 8GB dan storage 128GB.

Confidante kalau dilihat dari bentuknya sebenarnya lebih pas disebut sebagai tablet yang punya kickstand dan bisa dipasang cover yang juga berfungsi sebagai keyboard.

Layarannya berukuran 12,3 inch IPS dengan resolusi 2K, atau 2880 x 1920 pixel. Layar sentuh ini mendukung 10 point capacitive touch dan mendukung penggunaan stylus untuk Windows Ink. Ada dua kamera di perangkat ini, satu di depan dan satu di belakang. Resolusi kamera depannya adalah 5 megapixel dan kamera belakangnya 13 megapixel.

Zyrex membandrol Confidante dengan harga Rp 9,9 juta, dan saat ini sudah bisa dibeli, baik secara online maupun offline. "Harganya Rp 10 juta kurang sedikit, sudah termasuk Windows original," ujar Timothy.(ist)

Foto: Zyrex



Tampil Kekinian dengan Baju Gamis Pesta



Model baju gamis pesta semakin dicari kalangan perempuan berhijab. Selain karena memiliki model yang cenderung lebih tertutup, gamis juga punya banyak model dan warna yang bisa dipilih. Dengan desain mengikuti perkembangan zaman, penampilan hijabers bisa terlihat tetap kekinian. Berikut beberapa model baju gamis pesta kekinian yang bisa kamu coba.

GAMIS A-LINE BRUKAT GAMIS PEPLUM GAMIS KIMONO

Bahan brukat masih jadi salah satu primadona di masyarakat. Bahan brukat biasa digunakan untuk acara-acara resmi seperti pesta karena memiliki kesan yang mewah. Penggunaan bahan brukat pada gamis membuat penampilan menjadi elegan dan tidak memerlukan terlalu banyak aksesoris tambahan lagi. Punya model A-Line, model gamis ini sangat cocok untuk yang memiliki bentuk tubuh apel karena dapat memberikan lekukan yang indah pada bagian pinggang.

Bosan tampil biasa-biasa saja? Gamis model peplum bisa jadi alternatif pilihan kamu. Jika kamu sesuatu yang lucu dan menarik perhatian. Telah populer di era 80-an, peplum dapat memberikan kesan lucu, elegan, dan tidak biasa pada penampilannya Anda. Hal itu karena model ini terlihat berbeda karena punya ciri khas detail mekar di bagian pinggang.

Kimono adalah salah satu pakaian tradisional Jepang. Pada perkembangannya, kimono dipakai pada berbagai model pakaian terbaru, salah satunya gamis. Cocok digunakan untuk pergi ke pesta, gamis model kimono ini memberikan anggun dan lebih dewasa. Cenderung tebal dan berlayer double, gamis ini ideal untuk Anda yang bertubuh kurus.

GAMIS PAYET

Penggunaan payet pada pakaian dapat memberikan kesan mewah dan elegan pada penampilan. Hal ini yang membuat gamis payet bagus untuk digunakan pergi ke pesta dan jadi favorit. Untuk motifnya dapat disesuaikan sesuai kebutuhan dan selera masing-masing. Untuk hijabnya Anda bisa memilih yang polos untuk mengimbangi hiasan payet pada gamis. Pilihlah warna yang senada agar penampilan Anda lebih memukau.

GAMIS RUFFLE

Model ruffle kembali jadi tren. Punya ciri khas bergelombang dan terkadang bertumpuk, ruffle memiliki kesan yang feminim. Gamis ruffle memberikan kesan unik dan tidak membosankan. Kamu bisa padukan gamis ruffle dengan heels kesayangan untuk datang ke pesta.

GAMIS KAFTAN

Gamis Kaftan dapat membuat kamu tampil elegan dan mewah di pesta. Karena menciptakan ilusi tubuh yang lebih langsing, gamis model ini cocok untuk kamu yang memiliki tubuh berisi. (ist)



Kebijakan... (dari hal 1)

Kementerian Sosial (Kemensos) telah merilis Surat Edaran (SE) Nomor 150/3.2/BS.01.02/02/2021 yang mengatur soal santunan untuk ahli waris pasien COVID-19 yang meninggal dunia. SE tersebut membuat ratusan keluarga pasien Covid-19 yang meninggal tak mendapatkan santunan dari Kemenkes dengan alasan tidak ada anggaran.

Secara detil, SE Kemenkes tertanggal 18 Februari 2021 ini terdiri dari dua poin. Poin pertama, menyatakan pada tahun 2021 tidak tersedia alokasi anggaran santunan korban meninggal akibat corona. "Sehingga terkait rekomendasi dan usulan yang disampaikan Dinas Sosial Provinsi. Kab/kota sebelumnya tidak dapat ditindaklanjuti," dikutip dari SE yang ditandatangani Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial, Kemensos, Sunarti.

Di poin kedua, Kemensos minta Dinsos provinsi menyampaikannya itu ke Dinsos Kabupaten/Kota. "Dan selanjutnya tidak memberikan rekomendasi dan usulan lagi kepada Kemensos RI," tulis SE itu.

Kepala Dinas Sosial DIY Endang Padmintarsih membenarkan dirinya mendapatkan SE Kemensos terbaru soal tidak ada anggaran untuk santunan bagi pasien COVID-19 pada hari ini. "Iya (santunan dihentikan), jadi begini surat edaran itu juga baru saya terima resmi hari ini, kemudian kami di WA kemarin Sabtu. Ini ditindaklanjuti ke kabupaten kota, karena alokasi anggaran di 2021 tidak ada, jadi tidak bisa ditindaklanjuti," kata Endang, Senin (22/02).

Sejak adanya SE Kemensos soal pemberian santunan bagi pasien meninggal akibat Covid-19 pada Juni 2020 lalu di DIY belum ada yang mengajukan. "Belum ada, memang di 2020 berproses dari surat edaran disampaikan untuk santunan alokasi anggarannya," ujarnya.

Baru di tahun 2021 lah pihaknya mengusulkan sebanyak 151 orang meninggal dunia akibat terpapar Covid-19. Menurut pihak kabupaten dan kota harus mengumpulkan data terlebih dahulu. "Akhirnya belum bisa dicairkan kami sudah mengusulkan di DIY itu ada 151 jiwa, yang meninggal karena Covid," terangnya. "Belum ada satu pun yang terealisasi, mungkin Kemensos berproses dengan anggaran tapi ternyata tidak teralokasikan."

Alasan mengapa pengusulan tunjangan bagi pasien Covid-19 meninggal dunia baru dilakukan tahun 2021 karena hal itu tak bisa serta merta dilakukan tanpa dokumen. "Pengusulan, kita semua juga baru berproses karena kriteria. Kami kerjasama dengan dinkes karena yang mengeluarkan keterangan bersangkutan meninggal kena COVID-19 itu rumah sakit, jangan sampai ada hal-hal tidak diinginkan. Saya koordinasi dengan Dinkes bahwa surat yang dikeluarkan benar-benar kena COVID-19," paparnya.

Dengan adanya SE pembatalan pemberian santunan, pihaknya lalu menginformasikan kepada kabupaten kota agar SE

tersebut diinformasikan ke keluarga ahli waris. Dia memastikan sejak tahun 2020 hingga sekarang santunan tidak ada yang cair. "Tidak ada yang cair di semuanya tidak adayang cair," pungkasnya.

Senada, Dinas Sosial (Dinsos) di Ponorogo, Jawa Timur juga mengatakan jika 17 ahli waris pasien COVID-19 yang meninggal tak mendapatkan santunan dari Kemensos. "Jadi tanggal 18 Februari kemarin kami menerima surat dari Kemensos bahwa santunan akibat positif Covid-19 ini dibatalkan," tutur Kadinsos Supriyadi, Senin (22/02).

Padahal sebelumnya keluarga dari korban pasien COVID-19 yang meninggal dunia berhak atas uang santunan sejumlah Rp 15 juta berdasarkan Surat Edaran Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor 427/3.2/BS.01.02/06/2020, tentang Penanganan Perlindungan Sosial Bagi Korban Meninggal Dunia Akibat Covid-19.

Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsospermades) Banyumas Widarso mengatakan, belum menerima pemberitahuan secara resmi. Widarso sendiri mengaku masih bingung atas munculnya surat tersebut. Pasalnya Kemensos yang awalnya memerintahkan Dinsos provinsi dan kabupaten/kota untuk mengajukan nama-nama penerima santunan.

"Dulu Kemensos yang memerintahkan untuk mengajukan santunan keluarga yang meninggal akibat Covid-19, akan diberi santunan Rp 15 juta untuk ahli warisnya. Sudah kami kumpulkan (berkasnya), sudah kami kirim," ujar Widarso.

Hingga saat ini, pihaknya telah mengajukan sekitar 70 berkas pengajuan santunan untuk keluarga korban meninggal akibat Covid-19. Namun ia tidak tahu secara pasti jumlah yang telah menerima, karena santunan dikirim langsung dari Kemensos ke rekening ahli waris. "Setelah pergantian menteri ada informasi anggaran tidak tersedia di Kemensos. Salah satu Dirjen berkirim surat ke provinsi supaya kabupaten/kota tidak mengirimkan usulan penerima santunan," kata Widarso.

Pemprov, kata Widarso, juga telah berkirim surat ke Kemensos untuk menanyakan penghentian pemberian santunan, namun belum ada jawaban. "Kami masih

menunggu kepastiannya. Kami juga akan lapor kepada bupati dulu," ujar Widarso.

Sekadar mengingatkan, saat memimpin rapat terbatas yang disiarkan secara virtual, Senin (29/6/2020). Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mempercepat pembayaran pelayanan kesehatan bagi pasien positif terinfeksi virus corona Covid-19, termasuk penyaluran santunan bagi pasien yang meninggal.

"Saya minta agar pembayaran imbursement untuk pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan Covid ini dipercepat pencairannya. Jangan sampai ada keluhan yang meninggal harus segera apa itu, bantuan santunan itu harus mestinya begitu meninggal bantuan itu langsung keluar," ujar Jokowi kala itu.

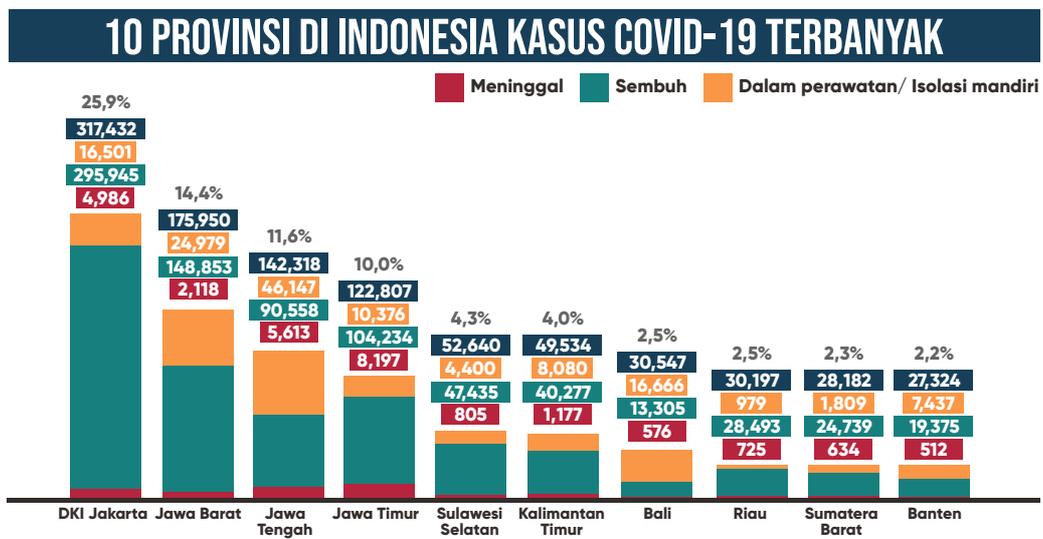
Perpres Santunan Vaksinasi

Terbaru, Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Dalam Perpres tersebut pemerintah menjamin kompensasi atau santunan bagi warga yang mengalami KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi) akibat pengaruh vaksin Covid-19.

Perpres tersebut mengatur pencatatan, pelaporan serta investigasi terkait KIPI yang akan dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan atau dinas kesehatan sesuai ketentuan perundang-undangan. Dalam pasal 15B ayat (1) disebutkan bahwa KIPI vaksinasi yang dipengaruhi oleh produk vaksin COVID-19 berdasarkan hasil kajian kausalitas, dan kasus tersebut menimbulkan kecacatan atau kematian, maka akan diberikan kompensasi oleh pemerintah.

"Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, bentuk, dan nilai besaran untuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan," bunyi Pasal 15B Ayat (3).

Tak hanya kematian, mereka yang perlu perawatan dan perawatan medis yang disebabkan oleh KIPI vaksin, biaya pengobatan dan perawatan akan ditanggung melalui mekanisme JKN jika terdaftar sebagai peserta program. (ist,ins)



NOW!!!

WHO YAKIN PANDEMI CORONA BERAKHIR AWAL 2022



Direktur Regional WHO untuk Eropa, Hans Kluge

Jakarta-Infeksi virus Covid-19 masih massif, namun Direktur Regional Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk Eropa Hans Kluge yakin pandemi corona ini akan berakhir pada awal 2022. Vaksinasi menjadi salah satu kuncinya, meski ada kekhawatiran terus munculnya mutasi baru virus ini.

"Akan terus ada virus, tapi menurut saya pembatasan tidak diperlukan. Ini pesan yang optimis," ujarnya pada lembaga penyiaran Denmark, DR, dikutip dari Anadolu Agency, Senin (22/02).

Dia juga menyebut skenario terburuk pandemi telah berakhir. Menurut Kluge, ada lebih banyak informasi mengenai virus tersebut dibandingkan tahun 2020, saat virus pertama menyebar.

Meski demikian, kata Kluge, tidak ada yang bisa mengetahui masa depan pandemi Covid-19. Kluge mengungkapkan bahwa mutasi sesuatu yang normal. Dari situ virus mencoba beradaptasi dengan orang yang terinfeksi. Namun penyebaran mutasi yang cepat tetap menjadi perhatian mereka.

WHO kata Kluge sedang memantau dengan cermat keefektifan vaksin untuk melawan virus corona karena jenis baru yang cepat menyebar. Ia juga menjelaskan vaksin dapat diubah berdasarkan mutasi baru jika perlu, akan tetapi dan tidak perlu memproduksi dari awal.

Dia mengatakan mutasi tidak akan membuat virus lepas kendali namun tercatat negara-negara dengan sistem kesehatan lemah, dapat mengalami tekanan yang lebih besar, sehingga mutasi virus perlu ditangani dengan sangat serius.

Masalah terbesar, terang Kluge, akan muncul ketika mereka yang divaksinasi berada di lingkungan yang sama dengan yang tidak divaksin. Sehingga penjadwalan menjadi faktor yang sangat penting.

Berdasarkan laporan Worldometer, per Senin (22/2) total kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di dunia mencapai 111.988.124, dengan angka kematian sebanyak 2.478.752. Sementara di Eropa kasus tertinggi Covid-19 ada di Rusia, dengan total 4.177.330 kasus dan 83.630 kematian.

Indonesia bertahan di peringkat ke-10 penambahan pasien corona dunia selama beberapa hari terakhir. Hal ini disebabkan oleh meredanya pandemi Covid-19 di sejumlah negara Eropa dan Amerika Latin. Sementara, dari total kasus, AS, India, Brasil, Rusia, dan Inggris masih berada di peringkat lima besar.

Herd Immunity RI Tercapai Maret 2022

Terpisah, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan dalam program vaksinasi Covid-19, herd immunity di Indo-

nesia akan tercapai pada Maret 2022.

"Dalam rangka herd immunity dan bila tidak ada aral melintang, selama 15 bulan ke depan, Indonesia akan mencapai herd immunity di Maret 2022," jelas Suharso dalam siaran resminya, Senin (22/02).

Suharso optimistis herd immunity di Indonesia bisa tercapai pada 22 Maret 2022, karena dilihat berdasarkan jumlah vaksin yang sudah tersedia untuk disuntikan ke hampir 182 juta penduduk Indonesia, dengan usia di atas 18 tahun dengan 15% stok lebih sebagai cadangan.

Dari total 182 juta penduduk yang akan divaksin, 40% diantaranya ditargetkan memperoleh penyuntikan lebih cepat. Sesuai dengan jumlah vaksin yang beredar, vaksin untuk 40% penduduk akan selesai pada September mendatang.

Program vaksinasi Covid-19, kata Suharso merupakan salah satu game changer untuk menurunkan angka penularan Covid-19 sekaligus sebagai upaya untuk memulihkan ekonomi. "Kita pastikan upaya penanganan Covid-19 sejalan dengan langkah pemulihan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat," tuturnya.

Berdasarkan data Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) per 21 Februari 2021 menunjukkan tahap satu vaksinasi Covid-19 sudah disuntikan kepada 1,22 juta atau sudah mencapai 83,6% dari target 1,46 juta tenaga kesehatan.

Sebelumnya, Menko Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) mengatakan pemerintah telah menjamin pasokan 420 juta vaksin Covid-19 hingga 2022. Vaksin itu berasal dari berbagai macam produsen vaksin di dunia.

Dari bahan presentasi yang dipaparkan oleh Airlangga, pada 2021 pemerintah telah mengamankan vaksin Sinovac 125,50 juta, Novavax 52 juta, Covax/Gavi 54 juta, AstraZeneca 59 juta, dan Pfizer 50 juta.

Kemudian vaksin Covid-19 yang disiapkan untuk 2022 yakni vaksin Novavax 22 juta, Covax/Gavi 24 juta, AstraZeneca 23,8 juta, dan Pfizer 16,49 juta. Dikalkulasikan, vaksin yang diamankan di tahun ini sebanyak 340,50 juta dan di tahun depan 86,29 juta. Jadi totalnya adalah 426,80 juta vaksin. (ist)

10 NEGARA DI ASIA DENGAN PENYEBARAN COVID-19 TERBANYAK

Negara	Kasus	Kematian	Sembuh
Asia	24,528,572	392,011	23,091,922
1. India	11,005,850	156,418	10,699,410
2. Turkey	2,638,422	28,060	2,523,760
3. Iran	1,582,275	59,572	1,531,390
4. Indonesia	1,288,833	34,691	1,096,994
5. Israel	752,389	5,585	707,173
6. Iraq	667,937	13,272	618,509
7. Pakistan	572,334	12,617	535,491
8. Philippines	563,456	12,094	522,874
9. Bangladesh	543,717	8,356	492,059
10. Japan	424,507	7,417	398,921

10 NEGARA DI DUNIA DENGAN PENYEBARAN COVID-19 TERBANYAK

Negara	Kasus	Kematian	Sembuh
Dunia	112,024,400	2,479,255	87,390,705
1. USA	28,765,423	511,133	18,973,190
2. India	11,055,850	156,418	10,699,410
3. Brazil	10,168,174	246,580	9,095,483
4. Russia	4,177,330	83,630	3,726,388
5. UK	4,115,509	120,580	2,494,218
6. France	3,605,181	84,306	247,127
7. Spain	3,133,122	67,101	2,497,956
8. Italy	2,809,246	95,718	2,324,633
9. Turkey	2,638,422	28,060	2,523,760
10. Germany	2,394,515	68,433	2,198,000

